

# PERANAN PANCASILA DALAM MENUMBUHKAN KESADARAN NASIONALISME GENERASI MUDA DI MASA PANDEMI COVID-19

Amelia Haryanti  
Universitas Pamulang  
dosen00811@unpam.ac.id

## ABSTRAK

Merebaknya pandemik covid 19 yang melanda hampir di seluruh dunia menjadikan masyarakat seolah-olah di hantui ketakutan dan saling curiga satu sama lain. Di sisi lain, bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tidak bisa menghindari tantangan globalisasi, namun dengan berpegang teguh pada Pancasila sebagai pedoman dan prinsipnya, maka Indonesia akan mampu mempertahankan eksistensi diri dan jatidirinya di tengah terpaan pandemic covid 19. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran generasi muda dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme agar mereka lebih memaknai nilai-nilai Pancasila sehingga akan terhindar dari pengaruh negative dan dekadensi moral yang merajalela di masa pandemi ini, dengan demikian dibutuhkan kekuatan etika dan ahlak yang baik melalui Pendidikan Pancasila pada generasi muda Indonesia agar mereka siap menghadapi globalisasi walaupun di masa pandemi covid 19 ini dengan tetap menjaga identitas dan eksistensi diri

**Kata kunci :** Pancasila, Pandemi covid-19, globalisasi

## PENDAHULUAN

Memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme yang dialami generasi muda bangsa Indonesia pada masa pandemi covid 19 ini menjadi permasalahan bagi bangsa kita. “Hal ini disebabkan banyaknya pengaruh budaya asing yang banyak masuk di negara kita, akibatnya banyak generasi muda yang melupakan budaya sendiri karena menganggap bahwa budaya asing merupakan budaya yang lebih modern dibanding budaya bangsa sendiri”[1] Hal ini berakibat nilai-nilai luhur bangsa banyak diabaikan hampir terjadi disebagian besar generasi muda. Sejak dahulu dan sekarang ini serta masa yang akan datang peranan pemuda atau generasi muda sebagai pilar, penggerak dan pengawal jalannya pembangunan nasional sangat diharapkan. Melalui organisasi dan jaringannya yang luas, pemuda dan generasi muda dapat memainkan peran yang lebih besar untuk mengawal jalann pembangunan nasional. Berbagai permasalahan yang timbul akibat rasa nasionalisme dan kebangsaan

yang memudar banyak terjadi belakangan ini, banyak generasi muda atau pemuda yang mengalami disorientasi, dislokasi dan terlibat pada suatu kepentingan yang hanya mementingkan diri pribadi atau sekelompok tertentu dengan mengatasnamakan rakyat sebagai alasan dalam kegiatannya.

Generasi muda sebagai pilar bangsa diharapkan memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme dengan tetap bertahan pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia meskipun banyak budaya asing masuk di negara Indonesia. Dengan berlandaskan Pancasila diharapkan pengaruh budaya asing bisa disaring sehingga generasi muda bisa menjadi generasi yang benar-benar cinta pada tanah air Indonesia apapun keadaanya. Di era globalisasi ini peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi batasan batasan diantara negara seakan tak terlihat sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Seperti kita ketahui, sekarang ini banyak generasi muda yang

moralnya rusak karena berbagai hal yang mempengaruhi mereka diantaranya karena dampak buruk globalisasi, teman bergaul, media elektronik yang semain canggih, narkoba, minuman keras, dan hal-hal negatif lainnya. Keadaan yang demikian sangat memprihatinkan dan perlu perhatian khusus karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan generasi tua membangun bangsa Indonesia. Namun jika sebelum tiba waktu mereka untuk turut serta dalam pembangunan bangsa ini, akhlak dan moral mereka sudah rusak. Tentu tidak akan maju Negara ini jika dibangun oleh generasi yang tiak bermoral. Untuk itu perlu pembenahan-pembenahan agar generasi penerus yang mendatang memiliki akhlak dan moral yang baik. "Kelangsungan hidup negara Indonesia di era globalisasi, mengharuskan kita untuk mengupayakan penerapan nilai-nilai Pancasila, agar generasi penerus bangsa yang akan datang tetap dapat menghayati dan mengamalkannya dan nilai-nilai yang luhur itu tetap menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa".[2].

## **METODE**

Data yang akan disajikan adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menganalisis data dalam bentuk naratif dimana semua argumentasi didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang telah ada dalam kerangka teori

## **HASIL**

Pancasila merupakan dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Setiap bangsa memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Oleh karena itu, perlu ada upaya pewarisan budaya penting

tersebut melalui pendidikan Pancasila yang dilaksanakan dalam pendidikan formal (sekolah). Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis-konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Dengan demikian penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa negara, sistem ini cenderung bertentangan dengan demokrasi dimana keterlibatan individu dalam melaksanakan pemerintahan sangatlah terbatas. Tingkat korupsi yang tinggi merupakan salah satu contoh dari pelaksanaan kekuasaan yang otoritarian.

Pancasila sebagai ideologi di sini berperan sebagai referensi bagi pembentukan identitas baru sebagai warga- negara. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kategori baru yang mengatasi batasan-batasan berdasarkan agama tertentu. Kemanusiaan menunjuk pada nilai universal. Kedua, prinsip ini mencerminkan peralihan dari lingkup yang partikularistik kepada yang universalistik, sebagai gejala modernisasi. Prinsip persatuan Indonesia menunjuk kepada referensi kelompok yang baru dan ikatan yang baru. Sedangkan kerakyatan dan keadilan sosial merupakan prinsip yang dituntut dari status baru sebagai warganegara yang sama. Pengaruh Althusserian itu juga tampak bagaimana memahami Pancasila sebagai ideologi. Dengan mengutip dari Thomson (1984), Sastrapratedja misalnya mendefinisikan ideologi sebagai seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Dalam ideologi terkandung beberapa unsur, pertama, adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan. Pancasila ditempatkan secara keseluruhan konteks Pembukaan UUD

1945 menunjukkan adanya interpretasi terhadap sejarah Bangsa Indonesia di masa lalu serta bagaimana seharusnya sejarah itu terbentuk di masa depan. Kedua, setiap ideologi memuat seperangkat nilai-nilai atau suatu preskripsi moral. Pancasila dengan jelas merupakan seperangkat nilai dan atas dasar nilai itu masyarakat ingin ditata. Ideologi secara implisit memuat penolakan terhadap sistem lainnya. Ketiga, ideologi memuat orientasi pada tindakan, ideologi merupakan suatu pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat di dalamnya. Pemahaman terhadap kenyataan tidak hanya bertujuan untuk memberi informasi dan menjelaskan, tetapi agar sesuatu dikerjakan, yaitu mentransformasikan dunia. Oleh karena itu dapat dikatakan ideologi memuat suatu interpretasi, etika dan retorika. ‘‘Dikatakan ideologi sebagai retorika, karena merupakan pernyataan tentang sesuatu kepada seseorang, sehingga ia tidak hanya berdiri dan diam saja, tetapi berbuat sesuatu (Sastraprteja, 1991: 142)’’[3].

Beberapa model maupun pembahasan tentang Pancasila dan pemaparan tentang adanya ideologi sebagai dasar negara, tidak lepas pula dengan adanya peran modal sosial (*social capital*) dalam pembentukan masyarakat yang berbangsa dan berbudaya. Modal sosial menjelaskan adanya sebuah hak hakiki yang dimiliki oleh masyarakat sebagai cerminan dalam pembentukan nilai-nilai tersebut. Salah satu dari wujud modal sosial tersebut adalah kepercayaan (*trust*). Disebutkan bahwa kepercayaan merupakan satu modal yang paling dasar dalam pembentukan ideologi tersebut. Masyarakat yang mempunyai kecenderungan dan terlalu bersemangat untuk mengadopsi sebuah nilai-nilai baru yang muncul dari paham yang masuk saat ini, membuat hidup masyarakat lebih menggantungkan terhadap nilai yang masuk tersebut, seperti paham

globalisasi dan fundamentalis. telah menjadi moral negara (Dipoyudo: 1984). Hal ini berarti bahwa moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan (A. T. Soegito, dkk, 2009: 6)[3].

Pelaksanaan Pancasila pada masa reformasi cenderung meredup dan tidak adanya istilah penggunaan Pancasila sebagai propoganda praktik penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terjadi lebih dikarenakan oleh adanya globalisasi yang melanda Indonesia dewasa ini. Masyarakat terbius akan kenikmatan hedonisme yang dibawa oleh paham baru yang masuk sehingga lupa dari mana, di mana, dan untuk siapa sebenarnya mereka hidup. Seakan-akan mereka melupakan bangsanya sendiri yang dibangun dengan semangat juang yang gigih dan tanpa memandang perbedaan. Pancasila disebut sebagai identitas Pancasila mampu memberikan satu pertanda atau ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat. Hal ini yang mendorong bagaimana statement masyarakat mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Sebagai contoh nilai keadilan yang bermakna sangat luas dan tidak memihak terhadap satu golongan ataupun individu tertentu. Unsur pembentukan Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa nilai luhur bangsa yang tercipta merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki dan tidak bisa tertandingi. Di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan, hal tersebut terbukti dengan adanya tempat peribadatan yang dianggap suci, kitap suci dari berbagai ajaran agamanya, upacara keagamaan, pendidikan keagamaan, dan lain-lain merupakan salah satu wujud nilai luhur dari Pancasila khususnya sila ke-1. Bangsa Indonesia yang dikenal ramah tamah,

sopan santun, lemah lembut terhadap sesama mampu memberikan sumbangan terhadap pelaksanaan Pancasila, hal ini terbukti dengan adanya pondok-pondok atau padepokan yang dibangun mencerminkan kebersamaan dan sifat manusia yang beradab. Pandangan hidup masyarakat yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar (*grounded, dogmatic*) dimensi kultur seyogyanya mendahului dua dimensi lainnya, karena di dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (*value system*). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan (Solly Lubis: 2003). “Masyarakat Indonesia sekarang ini tidak hanya mendambakan adanya penegakan peraturan hukum, akan tetapi masalah yang muncuk ke permukaan adalah apakah masih ada keadilan dalam penegakan hukum tersebut. Hukum berdiri diatas ideologi Pancasila yang berperan sebagai pengatur dan pondasi norma masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara” [4].

1. Nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sebagai suatu dasar filsafat Negara maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan (Kaelan dan Zubaidi, 2007:31). Pancasila memiliki

serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa. Di Era Globalisasi Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa bidang kehidupan[4].

Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Dalam kehidupan kenegaraan, perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena dengan tampaknya Pancasila dalam suatu peraturan dapat menuntun seluruh masyarakat dalam atau luar kampus untuk bersikap sesuai dengan peraturan perundangan yang disesuaikan dengan Pancasila. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral Negara, moral penyelenggara Negara, politik Negara, pemerintahan Negara, hukum dan peraturan

perundang-undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 31-32)[2].

## 2. Kemanusiaan yang adil dan Beradab

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 32). Sila kedua Pancasila mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada norma-norma dan kebudayaan baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. Asasi warga Negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 31-32).

## 3. Persatuan Indonesia

Sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Untuk itu manusia memiliki perbedaan individu, suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Konsekuensinya di dalam Negara adalah beraneka ragam tetapi mengangkat diri dalam suatu kesatuan dalam semboyan 'Bhineka Tunggal Ika'.

## 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Rakyat merupakan subjek pendukung pokok Negara. Negara merupakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara. Dalam sila keempat terkandung nilai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan negara.

## 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Konsekuensi nilai keadilan yang harus terwujud adalah: 1) keadilan distributif (hubungan keadilan antara Negara terhadap warga negaranya), (2) keadilan legal (keadilan antara warga Negara terhadap negara), dan (3) keadilan komutatif (hubungan keadilan antara warga negara satu dengan lainnya) Kesetiaan terhadap bangsa dan negara[5]. Pancasila sebagai dasar Negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai ideologi bangsa, menurut Suko Wiyono (2013, 95-96) memuat nilai-nilai/karakter bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila-sila Pancasila sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Kepercayaan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) kebebasan beragama dan berkepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang paling asasi bagi manusia; (3) toleransi di antara umat beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan (4) Kecintaan pada semua makhluk ciptaan Tuhan, khususnya makhluk manusia.
- 2) Nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Kecintaan kepada sesama manusia sesuai dengan prinsip bahwa kemanusiaan adalah satu adanya; (2) Kejujuran; (3) Kesamaderajatan manusia; (4) Keadilan; dan (5) Keadaban.
- 3) Nilai-nilai Persatuan Indonesia: Terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Persatuan; (2) Kebersamaan; (3) Kecintaan pada bangsa; (4) Kecintaan pada tanah air; dan (5) Bhineka Tunggal Ika.

- 4) Nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) kerakyatan (2) musyawarah mufakat (3) Demokrasi (4) Hikmat kebijaksanaan dan (perwakilan). (5) Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Keadilan; (2) Keadilan sosial; (3) Kesejahteraan lahir dan batin; (4) Kekeluargaan dan kegotongroyongan; (5) Etos kerja.

## 2. Makna Pancasila sebagai Ideologi.

Ideologi memainkan peranan yang penting dalam proses dan memelihara integrasi nasional, terutama di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia (Ubaidillah, 2000). Istilah ideologi berasal dari kata idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos berarti ilmu. Kata idea sendiri berasal dari bahasa Yunani eidos yang artinya bentuk. Selanjutnya ada kata idein yang artinya melihat. Maka secara harafiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham. Sebuah ironi di negara yang berdasarkan Pancasila yang sarat dengan nilai-nilai populis[3].

Ideologi berkaitan dengan tertib sosial, dan tertib politik yang ada, berupaya untuk secara sadar sistematika mengubah, mempertahankan tertib masyarakat. Suatu pemikiran mendalam, menyeluruh, menjadi ideologi apabila pemikiran, gagasan-gagasan tersebut secara praktis difungsikan ke dalam lembaga-

lembaga politik suatu masyarakat, suatu bangsa, suatu negara (Suparlan, 2012: 242).

Ideologi Negara dan ideologi bangsa dapat dikatakan sebagai suatu pemikiran yang mendalam, diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa dalam mempersatukan gerak langkah suatu kelompok, golongan, dan partai untuk menyatukan diri, menyeraskan diri secara berdaya guna dalam kehidupan politik, tingka laku politik, tujuan politik suatu Negara dalam upaya mewujudkan tujuan nasional Indonesia berdasarkan kepentingan nasional Negara.

Sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara, dengan lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 30-31). Pendidikan Pancasila pada dasarnya merupakan rumpun pendidikan kewarganegaraan yang mengkhususkan diri pada penanaman ideologi Pancasila ke dalam pribadi peserta didik sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dengan kata lain, Pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi di Indonesia (Margono, 2012: 1).

Pancasila sebagai ideologi nasional mengatasi faham perseorangan, golongan, sukubangsa, dan agama. Sehingga semboyan

Bhineka Tungga Ika diterapkan bagi segala masyarakat Indonesia dalam kesatuan yang utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional berupaya meletakkan kepentingan bangsa dan Negara Indonesia ditempatkan dalam kedudukan utama di atas kepentingan yang lainnya. Sehingga kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok menjadi nomor dua setelah adanya kepentingan nasional. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia, tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar Negara yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat tersebut, mengandung makna bahwa ideologi nasional tersebut sebagai cita-cita dan tujuan Negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian gerak ide, pola aktivitas, perilaku, serta hasil perilaku bangsa Indonesia harus bercermin pada Pancasila [6]

## **SIMPULAN**

Sikap nasionalisme bisa di mulai dari hal kecil saja misalnya membuang sampah pada tempatnya. Dari hal yang sangat kecil tersebut dapat diambil keuntungan dengan lingkungan menjadi bersih dan terutama sungai menjadi bersih.

Dengan kotornya sungai-sungai yang terdapat di kota-kota besar sekarang sangat menyusahakan Bangsa Indonesia,

karena persediaan air bersih berkurang dan juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal lain yang berkaitan dengan nasionalisme adalah mencintai produk Indonesia, membasmi KKN, memperbaiki sistem pendidikan, melakukan tebang pilih tebang tanam, dan lain sebagainya.

Untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus menanamkan sikap nasionalisme sejak dini, sejak kecil, atau sejak masa sekolah dasar. Karena jika sikap nasionalisme terlambat diimplementasikan kepada bangsa Indonesia, bangsa Indonesia telah kehilangan generasi muda yang rendah akan sikap nasionalisme. Maka untuk menanggulangi masalah tersebut dan untuk menambah rasa nasionalisme bangsa Indonesia adalah dengan dilatih tentang sikap-sikap yang baik sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila, tidak mengajarkan hal-hal yang melanggar nilai-nilai Pancasila, menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini, dan memberi penyuluhan kepada seluruh bangsa Indonesia akan pentingnya nasionalisme terhadap masa depan bangsa Indonesia.

Rasa nasionalisme bangsa Indonesia masih kurang dan belum menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Pengertian tentang nasionalisme juga masih disalahartikan oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan contoh-contoh diatas. Oleh karena itu, bangsa Indonesia masih perlu meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Karena rasa nasionalisme dan cinta tanah air sangat diperlukan untuk masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Memupuk rasa nasionalisme generasi muda harus dilakukan sejak dini,

sehingga lambat laun seiring dengan usia diharapkan rasa nasionalisme tetap bertahan pada diri bangsa Indonesia. Bisa dimulai dari kelompok terdekat misalnya keluarga, karena dari keluargalah rasa cinta tanah air bisa ditanamkan sejak dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Elisken, "Peranan Pancasila Dalam Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda Di Era Global," vol. 3, no. 2, pp. 54–67, 2015, [Online]. Available: <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.
- [2] A. P. Asmaroini, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi," *Citizsh. J. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 4, no. 2, p. 440, 2016, doi: 10.25273/citizenship.v4i2.107.
- [3] A. Rachman, I. Abdullah, and D. Surjo, "Wacana Pancasila Dalam Era Reformasi (Studi Kebudayaan Terhadap Pasang Surut Wacana Pancasila Dalam Kontestasi Kehidupan Sosial Dan Politik)," *J. Pemikir. Sociol.*, vol. 1, no. 2, p. 21, 2015, doi: 10.22146/jps.v1i2.23438.
- [4] Solly Lubis, "*Pancasila Sebagai Identitas Dan Nilai Luhur Bangsa Dan Bernegara, Analisis Tentang Peran Pancasila Sebagai Modal Sosial, Berbangsa Dan Bernegara*," vol. 2, no. 1, pp. 44–52, 2017, doi: 10.14710/jiip.v2i1.1634.
- [5] Kristiono, "Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang," *Harmony*, vol. 2, no. 2, pp. 193–204, 2017, [Online]. 10.25273/citizenship.v4i2.107.
- [6] Soeprapto, "Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat, Berbangsa dan Bernegara," *Jurnal Ketahanan Nasional*, vol. 10, no. 5, pp. 17–28, 2005.



